

## **Analisa Kegagalan Misi Perdamaian PBB di Democratic Republic of Congo**

**Deni Meutia**

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi,  
Universitas Respati Yogyakarta  
Jl. Laksda Adisucipto Km 6,3 Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281  
Telpon: 085743214375, Email: denimeutia@yahoo.com

### **Abstrak**

Democratic Republic of Congo (DRC) atau yang dulu disebut di Zaire adalah negara yang berlokasi di benua Afrika bagian tengah. Negara ini telah mengalami perang sipil yang berkepanjangan sejak lepas dari kolonialisme Belgia dan menyatakan kemerdekaan pada 30 Juni 1960. DRC paling tidak mengalami 2 kali perang sipil hebat yang bisa dikatakan sebagai perang sipil terbesar di benua Afrika yaitu Perang Congo pertama pada November 1996 sampai dengan Mei 1997, sedangkan Perang Congo kedua dimulai pada tahun 1998 merupakan perang sipil karena konflik etnis yang tidak hanya melibatkan DRC sebagai aktor dalam perang tetapi juga negara-negara tetangganya. Perang sipil dinyatakan berakhir pada tahun 2003 ditandai dengan perjanjian antara pihak yang bertikai ketika Pemerintahan Transisional DRC terbentuk. Fokus paper kali ini adalah pada Perang Sipil Kedua di DRC dan upaya operasi perdamaian PBB dengan rentang waktu fokus penelitian antara tahun 1998-2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan *peacebuilding triangle* Michael W. Doyle yang menyatakan ada 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan peace keeping, peace making dan peace building proses yaitu 1. *local capacity* (kekuatan domestik yang dimiliki oleh negara yang mengalami perang), 2. *hostility* (bentuk permusuhan yang mengemuka menjadi perang), 3. *international capacity* (intervensi atau dukungan dunia internasional). Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa kegagalan misi PBB dan kesulitan penciptaan perdamaian di DRC dikarenakan tingginya *hostility* dan rendahnya *local capacity*.

### **Pengantar**

Democratic Republic of Congo (DRC) merupakan suatu negara yang menderita karena perang sipil yang berkepanjangan antar fraksi militer dan pemberontak, kelompok etnis, dan juga negara tetangganya, serta negara tanpa pemerintahan pusat yang kuat sehingga menimbulkan banyak kudeta. Kelompok pemberontak bersenjata yang didanai dan dipersenjatai oleh negara tetangga membawa konflik di DRC semakin kompleks dan menjadikannya interstate war. Akibat perang sipil ini penduduk DRC banyak yang menjadi pengungsi, mengalami ancaman kekerasan fisik dan mental seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan pekerja seks, penculikan, child soldier, serta

eksploitasi terhadap sumber daya alamnya. Negara ini memerlukan bantuan internasional untuk keluar dari konflik militer dan sipil yang berkepanjangan.

United Nations Organization Mission in Republic Democratic of Congo (MONUC) dikirim untuk mengatasi konflik dan menciptakan damai di DRC. MONUC beroperasi berdasarkan mandat PBB dalam Resolusi DK PBB no. 1279 tahun 1999 yang merupakan tindak lanjut dari Lusaka Ceasefire Agreement yang menyatakan bahwa DRC memerlukan intervensi dari PBB untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan sekaligus menciptakan damai di negara tersebut serta

Resolusi DK PBB no 1291 tahun 2000<sup>1</sup>. Sejak penempatan pertamanya sebagai Joint Military Commission (JMC), MONUC mendapat banyak kritikan karena tidak banyak berbuat lebih dalam menciptakan damai di DRC. Mandate MONUC dinilai tidak menyentuh akar masalah dari konflik yang terjadi di DRC serta tidak melibatkan peran masyarakat DRC dalam upaya penciptaan peace making dan peace building.

Setelah penandatanganan Lusaka Ceasefire Agreement dan penempatan MONUC di DRC, kekerasan fisik justru semakin meningkat terutama di daerah eastern Congo yang berbatasan dengan Rwanda, Uganda dan Burundi. Kelompok-kelompok pemberontakan bersenjata melakukan penyerangan dan pembunuhan massal terhadap penduduk di daerah Kisangani, Ituri, North dan South Kivu Province<sup>2</sup>. Mandate MONUC selain mengawasi pelaksanaan Lusaka Ceasefire Agreement adalah melindungi penduduk sipil dari akibat konflik DRC, namun ketika terjadi pembantaian, penyerangan dan pembunuhan massal di daerah eastern Congo MONUC tidak bereaksi apa-apa. Seharusnya berkaca dari mandat yang ada untuk menjaga masyarakat sipil dengan seluruh kapabilitas yang ada, MONUC bisa melakukan respon untuk melindungi warga sipil dari serangan para pemberontak, namun ambiguitas mandate ini telah menciptakan perbedaan pandangan dalam menindak lanjuti pelaksanaan mandat tersebut. Protect Civilian dalam arti PKO tidak diperbolehkan untuk menyerang pihak-pihak yang bertikai kecuali jika untuk mempertahankan diri (pihak bertikai menyerang pasukan PKO). Pengertian ini yang menyebabkan pasukan PKO tidak bereaksi terhadap penyerangan yang terjadi. Banyak sekali kritik yang dilimpahkan kepada MONUC mengenai perlindungan terhadap warga sipil yang dinilai belum maksimal terutama di daerah eastern Congo yang masih bergejolak dengan konflik bersenjata.

---

<sup>1</sup> C. Bernath and A. Edgerton, *MONUC: Flawed Mandates Limit Success*, 2003, Washington DC, Refugees International, Hal. 6.

<sup>2</sup> Ibid, hal. 2

## Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk deskriptif analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Sebagian besar data yang didapat merupakan hasil penelusuran pustaka (studi pustaka) baik yang berasal dari laporan, jurnal, buku, berita, sumber internet dan berbagai sumber yang menopang ketersediaan data. Data yang ada kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan model dan analogi sesuai dengan teori yang digunakan. Penelitian diarahkan dengan menggambarkan keberhasilan suatu upaya peacebuilding melalui suatu model segitiga yang akan mampu menjelaskan keterkaitan antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mengapa suatu misi perdamaian dan upaya penciptaan perdamaian mengalami keberhasilan atau kegagalan. Melalui penelitian ini bisa diambil manfaat tentang apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membangun damai di negara yang dilanda konflik.

## Hasil dan Pembahasan

### Deskripsi Perang Sipil Kedua di Democratic Republic of Congo

Perang sipil kedua di DRC terjadi mulai tahun 1998. Perang sipil ini dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Laurent Desire Kabila mempertahankan kepemimpinan yang direbut dari tampuk kekuasaan Presiden Mobutu Sese Soko yang berkuasa secara diktator pada tahun 1997. Setahun setelah pernyataan diri sebagai kepala negara DRC, Kabila menerima banyak kritikan dari kelompok koalisinya karena dipandang tidak mampu mengontrol aktifitas militer kelompok oposisi<sup>3</sup>. Hal ini menyebabkan kemunduran dalam pemerintahan Kabila. Sebab-sebab kemunduran itu adalah sebagai berikut, pertama, Kabila mendapat tantangan dari

---

<sup>3</sup> T. Carayannis, dan H. Weiss., *The Democratic Republic of Congo, 1996-2002' in Boulden, J. (ed.) Dealing with conflict in Africa: The United Nations and Regional Organizations*. 2003. Basingstoke: Palgrave MacMillan. Hal. 20.

kelompok oposisi yang aktifitas politik dan militernya dibekukan ketika Kabila berkuasa. Kedua, semakin tidak harmonisnya hubungan antara Kabila dengan tentara koalisi dari Rwanda menyangkut permasalahan di propinsi Kivu Utara dan Kivu Selatan. Ketiga, terjadinya perpecahan dalam pasukan militer pemerintah antara etnis asli Congo dan etnis Tutsi Rwanda (Banyamulenge).

Akhir Juli 1998, Kabila akhirnya mengirim pulang pasukan koalisi Rwanda yang menyebabkan munculnya ketidakpuasan dari kelompok bersenjata Rwanda yang terorganisir dalam *Rassemblement Congolais pour la Democratie or Congolese Rally for Democracy (RCD)* yang mendapat dukungan dari pemerintah Rwanda dan *Mouvement Liberation du Congo (MLC)* yang didukung oleh pemerintah Uganda. Untuk melawan pemberontakan ini Kabila mendapat dukungan dari Zimbabwe, Namibia dan Angola. Konflik DRC ini berkembang tidak hanya perang sipil saja tapi berkembang menjadi perang internasional yang melibatkan banyak negara. Perang ini juga telah memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk mengeksploitasi sumber daya alam DRC.

Memanasnya situasi perang di DRC ini membuat dunia internasional menyatakan bahwa pihak-pihak yang bertikai untuk sesegera mungkin mengadakan perdamaian karena banyaknya korban jiwa yang jatuh. Pada 10 Juli 1999 pihak-pihak yang bertikai mengadakan perjanjian perdamaian yang dikenal dengan *Lusaka Ceasefire Agreement*. Perjanjian ini ditandatangani oleh DRC, Namibia, Angola, Zimbabwe, Rwanda, Uganda, Burundi, dua kelompok pemberontak utama yaitu RCD dan MLC dengan *Southern Africa Development Community (SADC)*, *Organisation of African Unity (OAU)* dan PBB sebagai saksi perjanjian tersebut<sup>4</sup>. Namun perjanjian kesepakatan gencatan senjata ini tidak bertahan lama karena tidak adanya kerjasama dan saling percaya antara pihak-pihak yang bertikai, dan tidak satu pun dari

mereka yang mampu memenuhi komitmen untuk membawa damai di bumi DRC.

Kegagalan *Lusaka Ceasefire Agreement* membuatnya hanya sebagai dokumen referensi saja ketika para pihak yang bertikai sudah tidak punya pilihan lain. Kerusakan akibat perang ternyata memberikan dampak yang diluar dugaan pihak-pihak yang bertikai. Perang yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan secara cepat ternyata berkembang menjadi ajang pertumpahan darah dan membutuhkan biaya untuk perang yang besar. Pihak-pihak yang saling berkoalisi ketika terjadi perang mengalami perpecahan akibat pertempuran berdarah dan besarnya kerugian yang harus ditanggung yang tidak kunjung selesai sehingga tidak ada pihak yang merasa mempunyai cukup kekuatan akan memenangkan perang ini.

Delapan belas bulan setelah penandatanganan *Lusaka Ceasefire Agreement* belum ada titik terang bahwa perang akan berhenti. Bahkan perang menjadi semakin brutal antara pasukan koalisi asing dan pasukan koalisi DRC. Banyaknya kepentingan dan motif perang yang melatarbelakanginya menyebabkan persoalan dan masalah yang berkembang semakin kompleks. Sementara itu perang lokal yang terjadi di negara-negara tetangga DRC mulai muncul dan bercampur dengan konflik yang terjadi di DRC yang membuat bumi DRC menjadi ajang perang regional yang tidak mudah untuk mencari titik damai antara pihak-pihak yang bertikai. Negara yang seharusnya bisa menjadi negara yang kaya karena melimpahnya sumber daya alamnya telah menjadi negara yang porak poranda karena ketidakstabilan politik dan keamanan, serta intervensi negara-negara tetangganya dalam upayanya menguasai sumber daya alam DRC.

#### **Aktor Konflik: Pro-Kabila vs Kontra-Kabila**

Aktor-aktor yang terlibat dalam perang ini bisa dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok koalisi pro-Kabila yang terdiri dari DRC, Angola, Zimbabwe dan Namibia

---

<sup>4</sup> *Ibid, hal. 23*

melawan kelompok koalisi kontra-Kabila yang terdiri dari Rwanda, Uganda, Burundi, dan kelompok-kelompok pemberontak bersenjata RCD dan MLC.

#### 1. Kelompok Koalisi Pro-Kabila

##### a. Democratic Republic of Congo

Representasi dari DRC adalah pemerintahan presiden Laurent Desire Kabila yang merebut kekuasaan lewat kudeta militer dari Presiden Mobutu Sese Soko. Dalam perang ini satu-satunya kepentingan yang ingin dipertahankan oleh Kabila adalah tetap berkuasa, sehingga Kabila lebih memilih untuk membagi negaranya daripada membagi kekuasaan. Pemerintahan Kabila berkuasa di DRC bukan karena dukungan penuh dari sisi internal DRC tapi lebih karena posisi tawarnya dan dukungan kekuatan eksternal dari luar. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Kabila melarang berbagai kegiatan politik, korupsi dalam pemerintahan, merepresi lawan-lawan politiknya, dan hanya mengizinkan partai-partai yang pro-pemerintah untuk ikut serta dalam pemilu. Keadaan ini tidak jauh berbeda dari pemerintahan Mobutu terdahulu, sehingga memicu ketidakpuasan dari pihak oposisi.

##### b. Angola

Angola memasuki DRC untuk mengamankan pemerintahan Kabila, khawatir akan kejatuhan Kabila bisa memicu jatuhnya DRC ketangan UNITA (Union Nationale pour l'Independance Totale de l'Angola atau National Union for Total Independence for Angola) disokong oleh Uganda dan Rwanda yang merupakan kelompok pemberontak bersenjata yang menginginkan kemerdekaan di Angola. Angola juga mempunyai kepentingan untuk mengamankan bandara Kigali dan Entebbe yang merupakan pintu masuk bagi pasokan senjata dan perdagangan berlian kelompok pemberontak di Angola. Dari terjadinya konflik di DRC ini Angola berupaya mengambil kesempatan untuk memutus rantai supply UNITA sebagai rencana strategis untuk melemahkan eksistensi kelompok-kelompok pemberontak Angola.

Pemerintah Angola juga mempunyai kepentingan ekonomi dibalik dukungannya terhadap DRC. Presiden Angola, Dos Santos,

yang mengontrol beroperasinya Sonangol (National Angolan Fuel Company) yang mana perusahaan ini menguasai jalur distribusi dan produksi minyak di DRC lewat anak perusahaannya yaitu Cohydro<sup>5</sup>. Pemerintahan Kabila telah menandatangani kesepakatan kerjasama pengelolaan minyak di DRC dengan perusahaan asal Angola ini, sehingga ada kepentingan dari Angola untuk mengamankan aset ekonomi mereka dari perang yang terjadi di DRC dengan memberikan dukungan dan bantuan militer kepada pemerintahan Kabila.

##### c. Zimbabwe

Sama seperti Angola, kepetingan ekonomi juga melatarbelakangi dukungan Zimbabwe kepada pemerintah Kabila. Pada tanggal 4 Desember 1998, Kabila dan Presiden Zimbabwe, Mugabe, menandatangani perjanjian "self-financing" intervensi oleh Zimbabwean National Defence Force (ZNDF). Berdasarkan kesepakatan tersebut, Zimbabwe Defence Industry (ZDI) akan menyediakan persenjataan dan amunisi bagi DRC, dan sebagai kompensasinya adalah perusahaan tambang Zimbabwe, Ridgepoint, akan mengambil alih pengelolaan Gecamines, perusahaan tambang DRC, dan mendapat pembagian keuntungan sebesar 37,5% dari hasil perusahaan tambang negara DRC tersebut<sup>6</sup>. Selain sumber daya tambang, pengamanan terhadap sumber listrik dan energi juga menjadi fokus Zimbabwe dalam keikutsertaannya dalam perang Congo.

##### d. Namibia

Keikutsertaan Namibia dalam perang Congo merupakan bentuk dari rasa solidaritas sesama negara SADC dan karena hubungan baiknya dengan Presiden Kabila. Meskipun ada beberapa kepentingan ekonomi yang melandasi namun tidak terlalu signifikan dan berpengaruh terhadap jalannya perang di DRC. Bahkan keberadaan pasukan Namibia di

---

<sup>5</sup> International Crisis Group Report. *Scramble for The Congo: Anatomy of An Ugly War*. 2006. Brussels, Belgia: Author.

<sup>6</sup> International Crisis Group Report. *Scramble for The Congo: Anatomy of An Ugly War*. 2006. Brussels, Belgia: Author.

DRC tidak cukup efektif dan mampu memberikan kontribusi dalam penciptaan kestabilan keamanan di DRC.

## 2. Kelompok Koalisi Kontra-Kabila

### a. Rwanda

Genocida yang dilakukan etnis Hutu terhadap etnis Tutsi di Rwanda mengakibatkan banyaknya etnis Tutsi yang mengungsi ke daerah bagian timur Congo dan membangun kembali kekuatan mereka. Pada tahun 1996, ketika saat itu Rwanda masih menjadi koalisi dari Kabila untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Mobutu, terlibat dalam konflik di DRC dalam kapasitasnya untuk mengamankan dan mencari dukungan dari DRC dalam usaha mereka untuk kembali melakukan perlawanan dan balas dendam terhadap pemerintahan Hutu di Rwanda.

Ketika Kabila berkuasa dan mulai terjadi friksi dengan Rwanda dengan puncaknya adalah ketika Kabila memerintahkan untuk mengirim pulang tentara Rwanda yang bermarkas di Kigali. Keputusan Kabila ini ternyata membuat pihak Rwanda tersinggung dan menganggap Kabila telah mengkhianati hubungan baik yang telah tercipta. Selain itu konflik yang terjadi juga dipicu karena dengan pengusiran pasukan Rwanda dari Kigali akan menghambat upaya Rwanda untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Kigali dan menguasai pasar berlian disana.

Keterkaitan antara Kabila dan Interahamwe juga menjadi pemicu ikut sertanya Rwanda dalam perang di DRC. Interahamwe merupakan kelompok etnis bersenjata yang melakukan genocida terhadap etnis Tutsi. Setelah pemerintahan Hutu digulingkan kembali oleh etnis Tutsi dan kembali memerintah di Rwanda menganggap bahwa keberadaan Kabila bisa menjadi ancaman terhadap keamanan Rwanda dengan memberikan dukungan terhadap Interahamwe di DRC untuk kembali bangkit dan memicu konflik lagi di Rwanda. Untuk itulah maka Rwanda berupaya menggulingkan Kabila dari kursi kepemimpinannya demi kepentingan politik dan strategis Rwanda.

### b. Uganda

Kepentingan Uganda untuk menjatuhkan pemerintahan Kabila didasarkan pada alasan keamanan nasional (national security). Tapi dibalik semua itu ada maksud lain yaitu keikutsertaan Uganda dalam perang regional ini akan menaikkan prestise negara dan juga alasan ekonomi berkaitan dengan sumber daya alam DRC yang melimpah membuat Uganda berhasrat untuk menguasainya. Selain itu perang sipil yang terjadi di Uganda juga menyebabkan konflik meluas ke DRC sebagai negara yang berbatasan dimana pihak Uganda mencurigai bahwa Kishasa memberikan dukungan kepada Allied Democratic Force (ADF) yaitu kelompok pemberontak dari Uganda. Bahkan presiden Uganda Museveni menyatakan bahwa Kabila seperti pendahulunya Mobutu, bersama dengan pemerintah Sudan merencanakan gangguan ketidakstabilan politik dan keamanan di Uganda.

### c. Burundi

Perang sipil yang terjadi di Burundi telah meluas hingga sampai di perbatasan antara Burundi dan DRC. Burundi khawatir Kabila akan memberikan tempat perlindungan bagi kelompok pemberontak dan mencoba mengobarkan semangat perlawanan terhadap pemberontak dan Kabila. Represi yang dilakukan terhadap pemberontak Burundi oleh pemerintah yang mengakibatkan banyaknya korban dari pihak pemberontak justru membuat hubungan antara Kabila dan kelompok pemberontak Burundi semakin erat. Bahkan kelompok pemberontak menyatakan bahwa perang yang dihadapi Kabila juga merupakan perang mereka.

### d. Rassemblement Congolais pour la Democratie or Congolese Rally for Democracy (RCD)

RCD dibentuk pada 1 Agustus 1998 dua hari setelah perang berkobar<sup>7</sup>. Gerakan ini pada dasarnya terbentuk untuk mengkritisi pemerintahan Kabila. Pendiri RCD adalah tokoh-tokoh oposisi Kabila yang terdiri dari

<sup>7</sup> International Crisis Group Report. *Scramble for The Congo: Anatomy of An Ugly War*. 2006. Brussels, Belgia: Author.

berbagai etnis dan latar belakang politik yang bergabung bersama untuk menumbangkan pemerintahan Kabila. RCD ini didukung oleh Uganda dan Rwanda.

e. *Mouvement du Liberation du Congolaise (MLC)*

Dibentuk oleh Jean-Pierre Bemba, dari kelompok anti-Kabila, yang berpusat di bagian utara Congo pada November 1998<sup>8</sup>. MLC ini mendapat dukungan penuh dari Uganda dan merupakan kompetitor dari RCD dalam upaya menggulingkan pemerintahan Kabila di DRC. Sulit untuk mengatakan apa posisi negara tetangga pada situasi di DRC. Seperti disebutkan sebelumnya, masing-masing negara di Afrika telah mengalami perpecahan di antara banyak kelompok etnis dan suku-suku yang memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana membina suatu hubungan dan kerjasama yang baik antar etnis di suatu wilayah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan mereka. Kelompok pemberontak di hampir setiap negara sekitarnya memiliki alasan satu sama lain untuk terus berjuang mencapai kepentingan mereka. Perpecahan etnis ini berasal dari sejarah penjajahan dan memiliki aturan dekolonisasi di mana benua dibagi menjadi negara-negara berdaulat dimana setiap kelompok memiliki wilayah mereka sendiri. Fragmentasi ini telah menjadi penyebab kerusuhan di semua negara, tetapi DRC tampaknya mengalami dampak yang paling berat dari aturan dekolonisasi Barat. Rwanda dan Uganda tampaknya negara utama yang memberikan kontribusi paling besar dalam konflik di DRC. Namun, negara-negara tetangga lainnya seperti Angola dan Burundi juga memiliki kelompok pemberontak yang menyerang perbatasan DRC. Angola sebenarnya adalah sebuah negara yang memiliki efek negatif dan efek positif pada DRC. Beberapa kelompok pemberontak Angola melakukan invasi, tapi pemerintah Angola juga mendukung pemerintahan DRC beberapa kali.

---

<sup>8</sup> Ibid

## **Dinamika Konflik di Democratic Republic of Congo**

Perang sipil merupakan konflik bersenjata yang terjadi antara pemerintah dan tentara nasionalnya berhadapan dengan satu atau beberapa kelompok pemberontak bersenjata (oposisi) yang resisten mengganggu keamanan nasional<sup>9</sup>. Kekerasan yang terjadi mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang sangat banyak dengan lokasi perang berada dalam teritorial negara tersebut. Para pemberontak biasanya merekrut penduduk lokal untuk dijadikan tentara dan mengontrol sebagian daerah teritorial suatu negara dimana konflik terjadi.

Perang sipil disebabkan oleh beberapa faktor, dalam *Making War and Building Peace the UN since 1990's* Doyle dan Sambanis mengklasifikasikan penyebab perang sipil ke dalam penyebab yang sifatnya ekonomis dan politis. Penyebab perang sipil berdasarkan teori ekonomi fokus pada efek dari modernisasi pada kelas sosial dan mobilisasi politik kelompok etnis pada suatu negara yang terdapat di suatu negara. Motif ekonomi bisa menyebabkan munculnya persaingan antar etnis untuk mendapatkan sumber-sumber ekonomi dengan cara mendukung lahirnya kelompok-kelompok pemberontak. Kompetisi semakin runcing jika pemerintah berkomitmen untuk menyokong salah satu etnis tertentu, maka lambat laun perang antar etnis berkembang menjadi perang sipil antara kelompok-kelompok etnis dengan pemerintah.

Dari sudut pandang teori ekonomi yang lebih moderen didapat suatu persepsi bahwa perang sipil terjadi karena ketidak mampuan negara dalam memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Apalagi jika sumber-sumber produksi dikuasai oleh pemerintah dan penduduk tidak mempunyai akses terhadap sumber-sumber produksi itu maka pemberontakan menjadi pilihan yang rasional dari pihak yang tertindas

---

<sup>9</sup> Michael W. Doyle, dan Nicholas Sambanis., *Making War and Building Peace: The United Nations since 1990's*. 2005. Princeton, NJ: Princeton University Press. Hal: 40.

untuk merebut akses kepada sumber-sumber produksi tersebut dari kekuasaan pemerintah. Tingkat kemiskinan suatu negara dengan keberagaman etnis menyebabkannya semakin rentan terhadap perang sipil.

Sedangkan teori politik melihat penyebab dari perang sipil dikarenakan karakteristik rezim yang berkuasa dan ketidakstabilan politik dalam pemerintahan rezim berkuasa tersebut. Gurr dan Hegree menyatakan bahwa pemberontakan merupakan produk dari keserakahan politik dari rezim yang berkuasa yang menimbulkan ketidakpuasan politik dalam masyarakat sehingga akhirnya rasa ketidakpuasan tersebut diwujudkan dalam aksi pemberontakan<sup>10</sup>. Negara yang tidak demokratis dan cenderung gagal dalam mengantisipasi fase awal munculnya ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah akan terjebak semakin dalam dalam konflik sipil.

Teori ekonomi dan politis secara nyata sepaham bahwa keanekaragaman etnis dan arti penting etnis atau kedudukannya dalam masyarakat mempengaruhi hubungan antara pemerintah, kelompok etnis dan perang sipil. Ekonom tertarik pada etnisitas karena dapat mempengaruhi organisasi pemberontakan. Ikatan etnis dapat meningkatkan komunikasi sosial; memfasilitasi koordinasi aksi kolektif dengan meningkatkan solidaritas kelompok, dan dengan meningkatkan kepercayaan, mengurangi biaya menegakkan kontrak sosial di bawah kondisi ketidakpastian. Ilmuwan politik fokus pada etnisitas baik sebagai afiliasi primordial yang dapat menghasilkan kekerasan, atau sebagai instrumen di tangan elit yang memanfaatkan keberadaan jaringan etnis untuk memobilisasi dukungan publik untuk kekerasan.

Berdasarkan pemaparan teori diatas maka penyebab terjadinya perang sipil di DRC dalam skala domestik lebih dikarenakan oleh permasalahan politis dimana terjadinya

---

<sup>10</sup> Roland Paris. *At War End's: Building Peace After Civil Conflict*. 2004. New York: Cambridge University Press.

kediktatoran semasa pemerintahan Presiden Mobutu. Disini Laurent Kabila yang bertindak sebagai pemimpin pemberontakan mengambil kesempatan untuk menggunakan sentimen Mobutu terhadap etnis Hutu Rwanda untuk melakukan koalisi menumbangkan pemerintahan Mobutu. Namun ketika Kabila berkuasa, dia juga menggunakan sentimen etnis untuk mengisi pemerintahan atas dasar orang-orang asli Congo saja (Congolesse) dan berupaya mendepak etnis Rwanda yang semula menjadi partner koalisi Kabila, terutama dalam hal pasukan kemanan negara, dalam menjalankan pemerintahannya. Sentimen terhadap etnis ini akhirnya digunakan oleh pihak Rwanda, bahwa pemerintahan Kabila anti terhadap etnis Rwanda, untuk mengobarkan pemberontakan. DRC yang merupakan negara multi etnis yang sebagian besar juga berasal dari negara-negara tetangganya akhirnya mudah sekali tersulut konflik yang berbasis pada etnis. Selain itu kepentingan ekonomi juga melatarbelakangi terjadinya konflik sipil di DRC. DRC yang kaya akan sumber daya alam membuat negara-negara tetangganya terutama Rwanda dan Uganda untuk menguasai DRC dikarenakan kedua negara ini merupakan negara yang miskin akan sumber daya alam. Adanya sentimen Kabila terhadap etnis yang berasal dari Rwanda dan Uganda digunakan secara baik oleh Rwanda dan Uganda untuk mengumpulkan dukungan guna menimbulkan ketidakstabilan keamanan di DRC sehingga dengan mudah akan bisa melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alam DRC. Kelompok-kelompok etnis di DRC pada dasarnya hanya digunakan oleh elit-elit politiknya dalam usaha mendapatkan tujuan politis maupun ekonomis mereka.

Perang sipil kadang-kadang dihubungkan dengan pemimpin yang buruk dan kadang-kadang ke lingkungan yang buruk atau pengaruh luar yang buruk oleh negara-negara tetangga atau oleh kekuatan-kekuatan besar. Analisis empiris Sambanis menyiratkan bahwa hidup di lingkungan "buruk" - yaitu di samping negara-negara dengan perang sipil atau di negara-negara dengan politik otoriter-bisa membawa suatu negara tiga kali lebih

besar kecenderungannya jatuh dalam perang etnis. Ada suatu hubungan yang saling terkait tentang mekanisme yang menjadikan internasionalisasi perang sipil dengan adanya keikutsertaan negara-negara tetangga dalam konflik etnis domestik. Beberapa studi menunjukkan bahwa konflik etnis akan menyebar ketika kelompok etnis menguasai daerah perbatasan dan kelompok etnis mayoritas akan bisa mempengaruhi kebijakan politik di salah satu negara, kelompok tersebut, adanya keterkaitan etnis dengan etnis lain di luar negeri, dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan asing melalui lobi nasionalis atau relasi dan koneksi yang lain. Hal lain yang meng-internasionalisasikan perang sipil adalah intervensi asing terhadap perang etnis.

Perang sipil di DRC mempunyai dimensi buruknya kepemimpinan dan pengaruh dari negara-negara tetangganya seperti akibat genosida yang terjadi di Rwanda membawa DRC kedalam perang sipil yang semakin kompleks. Sebagai negara yang multi etnis, etnis di DRC juga berasal dari negara-negara tetangganya yang tentunya punya keterkaitan emosional antar sesama etnisnya. Keterkaitan emosional ini yang digunakan para elite yang berkepentingan untuk menghimpun massa dan kekuatan lewat propaganda dan provokasi sehingga menimbulkan ketidakstabilan keamanan. Jika pada waktu menggulingkan Mobutu, Kabila menggunakan sentimen Mobutu terhadap etnis Rwanda guna mencari dukungan maka ketika Kabila berkuasa keadaan terbalik dimana pihak Rwanda menggunakan sentimen etnis untuk melemahkan pemerintahan Kabila. Disinilah keterkaitan etnis digunakan untuk mencari massa dan menghimpun kekuatan dalam suatu aksi pemberontakan.

Setelah perang dimulai, ketidakpercayaan dan permusuhan meningkat dan mengakhiri perang melalui negosiasi menjadi lebih sulit. Perang sipil panjang berlanjut melalui mekanisme permusuhan bahwa kekerasan menciptakan penderitaan dalam masyarakat serta dengan menanamkan disiplin dan kohesi dalam organisasi pemberontak

berupaya mencari sumber-sumber pembiayaan yang memungkinkan pemberontakan terus berlanjut. Tingginya tingkat kematian dan pengungsi dapat menghasilkan kebencian dan ketakutan yang membuat penyelesaian konflik yang dinegosiasikan sulit tercapai. Untuk tingkat permusuhan tertentu, kelompok pemberontak perlu menemukan cara untuk membiayai pemberontakan mereka dan penjarahan sumber daya alam dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung pemberontakan dalam waktu yang panjang.

Banyaknya pihak yang berkonflik dalam perang sipil yang terjadi di DRC menyebabkan banyaknya kepentingan yang harus diakomodasi dalam menciptakan perdamaian lewat negosiasi belum termasuk di dalamnya penderitaan dan kerugian yang dialami oleh rakyat sipil. Kesepakatan antar pihak sulit untuk dicapai, apalagi aktor konflik tidak hanya bertindak sebagai negara saja tetapi juga individu dan kelompok kepentingan seperti kelompok etnis yang melakukan pemberontakan. Lusaka ceasefire agreement yang merupakan kesepakatan pihak yang bertikai dalam perang sipil di DRC tercapai karena dorongan dan intervensi dari pihak asing. Keterlibatan dan intervensi ini memang memberikan efek positif karena mampu memaksa pihak-pihak yang bertikai untuk bernegosiasi tetapi sisi negatifnya adalah belum tercapainya "hurting stalemate" yang menyebabkan negosiasi yang ada tidak didasari oleh keinginan secara murni berdamai namun lebih dikarenakan desakan dari pihak luar dan permainan kepentingan. Maka disinilah upaya penciptaan peace keeping, peace making dan peace building tidak dengan mudah bisa diimplementasikan. Peace keeping secara efektif diterapkan ketika ada "peace" telah terjadi mungkin melalui mekanisme kesepakatan dari pihak-pihak bertikai untuk mengakhiri konflik karena sudah mencapai "hurting stalemate", kemudian ketika ada peace keeping maka peace making dan peace building mulai berjalan. Namun dalam kasus perang sipil di DRC bentuk "peace" yang ada sifatnya semu karena bukan merupakan keinginan murni dari pihak yang bertikai untuk berdamai dan lebih karena desakan dan

intervensi dari luar. Sehingga ketika sudah tercapai kesepakatan, tingkat kekerasan bukannya menurun tetapi meningkat karena masing-masing pihak tidak mempunyai kepercayaan satu sama lain untuk mematuhi dan menjalankan kesepakatan damai.

Dalam suasana yang tingkat kekerasannya tinggi pasukan PBB MONUC dikirim untuk misi peace keeping dengan agenda utama mengawasi dan memastikan pihak-pihak yang bertikai mengimplementasikan hasil Lusaka Ceasefire Agreement, namun ketika kenyataan di lapangan berkata lain maka DK PBB menambah mandat MONUC untuk juga melaksanakan perlindungan terhadap warga sipil DRC yang menjadi korban perang sipil. Tidak adanya kepercayaan dan rendahnya integritas pihak yang bertikai terhadap pelaksanaan Lusaka Ceasefire Agreement membuat konflik yang ada semakin memburuk dengan tingkat kekerasan yang semakin brutal karena ketika pasukan PBB memasuki DRC semakin mempertinggi tensi adanya intervensi asing. Penduduk sipil menjadi pihak yang paling menderita karena dijadikan target sasaran penyerangan dan tidak cukup mendapat perlindungan dari tentara pemerintah maupun tentara PBB. Tentara PBB pun merasa kualahan terhadap aksi pemberontak karena organisasi kemanusiaan, markas dan personel PBB pun menjadi sasaran penyerangan yang memunculkan dilema dalam pasukan PBB untuk lebih dulu menyelamatkan kepentingan PBB atau menyelamatkan penduduk sipil DRC. Mandat yang diberikan pun ambigu karena sebagai kapasitasnya pasukan penjaga perdamaian, MONUC hanya diperbolehkan membalas serangan jika berada dalam keadaan terdesak yang mengancam keselamatan jiwa pasukan MONUC, sehingga penyerangan terhadap warga sipil tidak dikategorikan sebagai alasan untuk bisa membalas serangan yang dilakukan pemberontak. Disinilah muncul banyak kontroversi karena sebagai pasukan PBB MONUC seharusnya mampu melindungi warga sipil dari kekerasan tetapi keberadaan MONUC di DRC ternyata tidak memberikan kontribusi yang cukup dalam upaya

perlindungan terhadap warga sipil dan hanya bertindak sebagai pengamat saja.

Keberhasilan suatu misi peace keeping sangat bergantung pada mandat yang diberikan. Mandat yang sesuai dengan permasalahan akan membantu pasukan peace keeping untuk menerapkan strategi yang efektif digunakan untuk membangun perdamaian di daerah konflik. Mandat menjadi sumber acuan utama bagaimana misi peace keeping bisa menggunakan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki untuk menjaga agar pihak-pihak yang bertikai tidak lagi melakukan kekerasan dan patuh pada kesepakatan perdamaian sehingga ketika pihak yang bertikai sudah mematuhi kesepakatan dan kekerasan berkurang maka secara langsung akan juga bisa melindungi warga sipil dari kekerasan fisik. Berdasarkan Doyle dan Sambanis ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan misi peace keeping dalam menjalankan mandat yang diembannya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan peace keeping, peace making dan peace building proses yaitu 1. Local Capacity (kekuatan domestik yang dimiliki oleh negara yang mengalami perang), 2. Hostility (bentuk permusuhan yang mengemuka menjadi perang), 3. Internasional Capacity (intervensi atau dukungan dunia internasional). Bentuk segitiga juga memungkinkan untuk memvisualisasikan penciptaan keberhasilan peace building process sejak tiga set variabel berinteraksi kompetitif (H vs IC dan LC) dan kooperatif (LC dan IC) untuk menghasilkan ruang bagi perdamaian. Segitiga adalah metafora untuk ruang perdamaian setelah perang sipil. Ruang yang tersedia ditentukan oleh interaksi dari tiga sisi segitiga: Kapasitas Lokal (LC), Kapasitas Internasional (IC), dan Tingkat Permusuhan (H). Kapasitas lokal dan internasional yang lebih besar dan permusuhan yang lebih rendah, semakin besar kemungkinan akan tercipta ruang untuk perdamaian. Hal ini berdasarkan asumsi ketat yang positif dari IC, melalui dukungan dan legitimasi yang ditawarkan negara-negara berdaulat berdasarkan hukum internasional dan norma-norma.

Untuk mengukur apakah mandat yang diemban oleh suatu misi PKO berhasil apa tidak ada beberapa indikator yang bisa diterapkan untuk menganalisisnya berdasarkan segitiga konsep yang sudah dijelaskan diatas. Dari sisi Hostility indikator yang bisa digunakan adalah ethno-religious war, korban jiwa dan jumlah pengungsi, durasi perang, faksi atau aktor dalam perang, etnisitas, dan kesepakatan damai. Dari sisi Local Capacity indikator yang bisa dilihat adalah tingkat ekonomi dan ketersediaan sumber daya alam, sedangkan dari sisi International Capacity bisa dilihat dari transfer ekonomi dan misi perdamaian PBB di daerah konflik.

Dengan menggunakan indikator-indikator diatas mari kita analisa bagaimana MONUC tidak bisa secara sempurna melaksanakan mandate “civillian protection”. Mari kita jabarkan mulai dari indikator-indikator yang berhubungan dengan hostility.

- a. Ethno-religious wars : upaya untuk mengintegrasikan berbagai etnis dalam suatu perdamaian menjadi sulit ketika antara etnis yang bertikai mempunyai perbedaan cara pandang dan sentimen terhadap etnis yang lain. Perang sipil yang terjadi di DRC merupakan perang dengan latar belakang penggunaan etnis sebagai basis utama untuk meraih simpati massa dan menghimpun kekuatan. Dengan adanya latar belakang etnis ini memungkinkan damai sulit dicapai karena tidak bisa hanya merujuk pada satu etnis tertentu saja tapi harus ada keseimbangan dan keadilan perlakuan terhadap seluruh etnis yang ada agar tidak terjadi kecemburuan yang berujung pada konflik.
- b. Korban jiwa dan jumlah pengungsi : banyaknya jumlah korban jiwa dan pengungsi akibat dari perang merupakan suatu tantangan yang harus diselesaikan oleh misi perdamaian PBB, terutama jika menyangkut “civillian protection”. Ketika misi perdamaian dikirim dan ternyata jumlah korban jiwa dan pengungsi menurun maka bisa dikatakan bahwa misi tersebut berhasil, namun jika

sebaliknya bisa dikatakan misi yang ada gagal. Dalam kasus DRC, jumlah korban jiwa dan pengungsi setelah MONUC beroperasi adalah meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh pemberontak yang juga menyerang pasukan PBB yang dianggap telah melakukan intervensi terhadap permasalahan domestiknya. Jadi disini bisa dikatakan bahwa keberadaan MONUC justru meningkatkan kekerasan yang dilakukan oleh pemberontak yang berakibat pada meningkatnya jumlah korban jiwa dan pengungsi.

- c. Durasi perang : waktu perang yang lama membuat permusuhan semakin dalam dan juga korban berjatuhan semakin banyak, biaya perang semakin mahal dan sulit mencapai perdamaian karena perang telah berlarut-larut sehingga menimbulkan penderitaan dan tantangan baru. Perang sipil di DRC berlangsung cukup lama yang menyebabkan rusaknya kehidupan rakyat, korban jiwa, pengungsi dan eksploitasi sumber daya alam. Perang DRC yang cukup lama menimbulkan trauma yang mendalam bagi rakyat yang tidak mudah untuk disembuhkan sehingga upaya untuk menciptakan perdamaian lewat peace keeping, peace making dan peace building process mengalami banyak hambatan.
- d. Faksi atau aktor dalam konflik : jumlah aktor yang terlibat dalam suatu konflik menentukan usaha untuk menciptakan perdamaian. Semakin banyak aktor yang terlibat maka upaya penciptaan damai akan semakin sulit dilakukan karena banyaknya kepentingan yang bermain dan sulitnya mencari kesepakatan antar aktor untuk duduk bersama menghentikan peperangan. Banyaknya aktor yang terlibat mengindikasikan besarnya permusuhan yang terjadi. Inilah yang terjadi di DRC, banyak sekali aktor yang terlibat dalam perang sipil bukan hanya aktor lokal tetapi juga aktor internasional. Banyaknya aktor yang bermain dalam perang sipil di DRC menyebabkan sulitnya untuk mencapai

kesepakatan untuk menghentikan perang meskipun telah ada kesepakatan damai yang mengikat pihak-pihak yang bertikai.

- e. Etnisitas : negara yang multi etnis ketika terjadi konflik akan lebih rentan dan sulit membangun kembali perdamaian karena ada fragmentasi antara etnis-etnis yang ada. Akan lebih mudah mengkoordinasikan dan mengatur bagaimana proses distribusi perdamaian dalam suatu masyarakat yang homogen daripada yang heterogen.
- f. Kesepakatan perdamaian : kesepakatan perdamaian menjadi point penting untuk dapat terlaksananya misi perdamaian PBB. Peace keeping proses bisa dilakukan jika sudah ada “peace” dulu mungkin melalui kesepakatan gencatan senjata atau kesepakatan damai, ketika fondasi untuk peace itu sudah ada maka dilanjutkan usaha untuk menjaga peace tersebut agar tetap bertahan melalui peace keeping process. Kesepakatan perdamaian menandakan berakhirnya permusuhan antar pihak yang bertikai dan bisa dikatakan sebagai keberhasilan dalam misi perdamaian PBB. Indikator dari Local Capacity indikator adalah melalui tingkat perekonomian dan ketersediaan sumber daya alam.

a. Tingkat perekonomian : penciptaan damai di suatu negara yang sedang berkonflik berbanding lurus dengan tingkat perekonomiannya. Semakin tinggi perekonomian suatu negara maka akan semakin damai negara tersebut. Negara dengan tingkat perekonomian yang tinggi jika mengalami perang sipil maka akan mudah untuk membangun kembali negaranya. Kemiskinan sangat rentan terhadap tindakan kekerasan.

b. Ketersediaan sumber daya alam : negara yang kaya akan sumber daya alam akan membawa negara-negara tetangganya untuk melakukan invasi, apalagi jika negara tetangganya merupakan negara dengan sumber daya alam yang lebih sedikit. Sumber daya

alam yang melimpah juga dijadikan sumber pembiayaan aktifitas pemberontakan. Di DRC para pemberontak melakukan perdagangan berlian, salah satu sumber daya alam DRC, guna membiayai pemberontakan mereka.

Indikator dari International Capacity adalah dari transfer ekonomi dan pengiriman misi perdamaian PBB.

- a. Transfer ekonomi : bisa dilihat dari masuknya bantuan kemanusiaan ketika perang terjadi. Economic assistance terutama dari dunia internasional diperlukan untuk membantu negara yang mengalami peperangan tidak semakin terpuruk perekonomiannya dan lebih cepat proses pembangunan kembali pasca perang.
- b. Misi perdamaian PBB : misi perdamaian PBB dengan mandat yang sesuai akan mampu membantu negara yang mengalami perang sipil untuk kembali membangun negaranya lewat proses peace keeping, peace making dan peace building.

Keterlibatan Rwanda dan Uganda menjadi sebab jatuhnya DRC dalam perang yang panjang dan kompleks ini. Perang sipil, ketidakstabilan politik dan konflik etnis yang terjadi di negara ini telah meluas dan mengakibatkan DRC yang berbatasan dengan kedua negara ini terkena dampaknya. Selain itu keinginan kedua negara untuk menginvasi DRC dan menguasai sumber daya alamnya telah menjadi pemicu terjadinya konflik kepentingan yang tidak hanya bersifat lokal tapi berkembang menjadi konflik regional yang mengikutsertakan banyak negara bertikai di dalamnya.

Akar masalah dari konflik yang ada di DRC sebenarnya merupakan produk kebijakan pemerintah kolonial di Afrika masa kolonialisme dulu yang membagi-bagi penduduk disana berdasarkan etnis dan memecah belah mereka agar lemah dan tidak terjadi persatuan untuk melawan pemerintahan kolonial. Fragmentasi etnis ini telah membawa

beberapa negara di Afrika mengalami perang sipil yang mengerikan karena tidak adilnya distribusi kekuasaan yang diberikan oleh pemerintahan kolonial terhadap berbagai etnis di Afrika. Beberapa etnis diberi privilege yang lebih terhadap etnis yang lain dan memberikan dukungan kepada etnis tertentu untuk berkuasa di suatu wilayah. Kebijakan untuk mengkotak-kotakkan etnis ini, yang pada mulanya adalah strategi pemerintah kolonial untuk meredam perlawanan dari penduduk Afrika, menjadi permasalahan yang membawa Afrika pada perang saudara yang berkepanjangan yang tidak hanya membuat negara-negara di Afrika mengalami ketidakamanan politik, terjadinya banyak pembantaian massal, perkosaan massal terhadap wanita, permasalahan pengungsi, perebutan sumber daya alam dan banyak negara mengalami apa yang disebut “failed state” karena terus terjebak dalam konflik sipil dan politik yang tidak berkesudahan. Dan DRC juga mengalami hal yang sama. Konflik etnis yang sebenarnya muncul di negara-negara tetangganya seperti Rwanda, Uganda dan Burundi telah menyebar dampaknya dan membawa DRC menjadi tempat pertempuran regional.

Penyebab lain munculnya Perang Congo kedua adalah kegagalan Kabila dalam menjalankan pemerintahannya karena tidak didasarkan pada dukungan penuh dari dalam negeri dan lebih memilih untuk meminta bantuan asing untuk menyokong pemerintahannya. Ketika berkuasa Kabila tidak membawa perubahan berarti di DRC. Pemerintahan Kabila tidak jauh berbeda dengan pemerintahan Mobutu yang bertindak secara otoriter, tidak menegakkan hak asasi manusia, pelarangan aktivitas politik terutama pihak oposisi, tidak mau bekerjasama dengan civil society, dan menjadikan DRC sebagai pion dari pasukan asing yang terlalu ikut campur dalam pemerintahan Kabila.

Satu tahun setelah berkuasa, banyak dari pemimpin-pemimpin negara yang dulu membantu Kabila meraih kekuasaan tidak puas dengan performa kepemimpinannya. Kabila dinilai bertindak terlalu independen dan tidak peduli dengan nasehat yang diberikan

oleh para pendukungnya. Pemicu-pemicu konflik mulai muncul ketika Kabila mulai melakukan hubungan dengan negara-negara barat yang membuat negara-negara koalisinya (Rwanda dan Uganda) merasa tidak senang. Hubungan yang dibangun antara Kabila dengan pemerintah Sudan telah membawa ketegangan antara DRC dan Uganda, karena Sudan mendukung eksistensi kelompok pemberontak di Uganda. Hubungan Kabila dengan Rwanda juga memburuk dipicu oleh keputusan Kabila mendukung Interahamwe, kelompok bersenjata melakukan genosida, dan mempersenjatai mereka, yang berakibat marahnya Rwanda dan menyatakan permusuhan total kepada Kabila.

Konflik yang berkembang antara Kabila vs Rwanda-Uganda telah mengubah peta koalisi di DRC. Ketika Mobutu berkuasa, Rwanda dan Uganda menjadi koalisi utama Kabila untuk mendapatkan dukungan menggulingkan Mobutu. Namun ketika Kabila berkuasa dan mulai meninggalkan koalisinya lambat-laun menciptakan friksi diantara mereka. Beberapa keputusan Kabila seperti membangun hubungan dengan Sudan dan mendukung Interahamwe telah membuat friksi yang ada semakin jelas dan membawa perpecahan dalam koalisi. Rwanda dan Uganda yang semula merupakan pendukung utama Kabila, berbalik menjadi musuh utama, bahkan dari perpecahan ini juga memunculkan kelompok-kelompok pemberontak seperti RCD dan MLC. Perpecahan dan juga munculnya kelompok pemberontak ditambah dengan perang sipil yang terjadi di daerah Eastern Congo mengakibatkan DRC kembali mengalami perang. Ketika perang terjadi komposisi pendukung Kabila dan penentangannya pun berubah, kelompok pendukung Kabila datang dari negara SADC yaitu Angola, Zimbabwe dan Namibia dengan berbagai kepentingan yang mereka bawa, disisi lain penentang Kabila adalah Rwanda, Uganda, Burundi, RCD dan MLC. Dan membawa mereka kedalam perang regional yang berkepanjangan dengan korban jiwa yang besar dan pembiayaan perang yang telah menguras anggaran negara masing-masing.

## **Membangun Damai di Democratic Republic of Congo**

Lusaka Ceasefire Agreement dibentuk untuk mencoba mengatasi konflik yang mulai muncul agar tidak semakin menjadi perang yang lebih besar lagi. Akhirnya pada Juli 1999, negara-negara yang terlibat di dalam perang yaitu DRC, Zimbabwe, Angola, Namibia, Rwanda, Uganda dan Burundi menandatangani kesepakatan damai Lusaka, tetapi dari pihak kelompok bersenjata yaitu RCD dan MLC menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut. Lusaka Ceasefire Agreement ini merupakan bentuk usaha dari preventive diplomacy yang dilakukan oleh SADC dan OAU untuk mencegah konflik yang ada menjadi lebih mengerikan<sup>11</sup>. Kebuntuan ekonomi dimana negara-negara yang terlibat harus mengeluarkan anggaran lebih untuk perang serta perang sipil yang terjadi di negara masing-masing, dan tekanan dari dunia internasional telah membawa pihak-pihak yang bertikai mau duduk bersama untuk berunding. Namun disinyalir bahwa negara-negara yang mau duduk berunding mendapat kompensasi yaitu pemberian bantuan ekonomi dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa jika mereka mau berunding dan berdamai. Namun setidaknya Lusaka Ceasefire Agreement telah memberikan guidance untuk PBB bisa melakukan peace making dan peace keeping process dengan mengirimkan pasukan perdamaian ke DRC (MONUC).

MONUC bertugas untuk mengawasi dan membantu penerapan kesepakatan perdamaian Lusaka dengan dasar mandate Resolusi DK PBB no 1291 tahun 2000. Namun begitu konflik terus berkembang dan memerlukan lebih banyak lagi pasukan keamanan untuk menjaga kestabilan keadaan di DRC dan dengan Resolusi DK PBB no 1565 tahun 2004 dengan mandat menekankan pada

---

<sup>11</sup> Swart, S.G. and Solomon, H. *Conflict in the DRC: A critical assessment of the Lusaka Ceasefire Agreement* in SAIIA Report, No 40. 2004. Johannesburg: The South African Institute for International Affairs

perlindungan warga negara, menjamin perlindungan bagi semua personil PBB dan fasilitasnya, mengawasi dan mengambil kendali dari daerah pemberontak yang terkena embargo, dan pelaporan atas posisi dan gerakan kelompok-kelompok bersenjata di seluruh negeri. Tambahan lain dari mandat MONUC di DRC termasuk mengamankan pejabat negara, melucuti senjata dan demobilisasi pasukan asing, memantau proses perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi di DRC, dan bahkan memberikan kontribusi untuk proses pemilu agar berjalan dengan lancar dan. Resolusi DK PBB no 1797 tanggal 30 Januari 2008 memberikan mandat resmi kepada MONUC untuk membantu mengatur, menyiapkan dan melakukan pemilu akhir tahun 2008 sebagai upaya peace building di DRC. Namun tugas MONUC juga tidak dengan mudah bisa dilakukan. Selain ketidakpercayaan pihak-pihak yang bertikai terhadap PBB, Kabila sendiri pun tidak mau PBB ikut campur dalam pemerintahannya dan menolak kehadiran PBB di DRC.

Pihak internasional seperti Perancis, AS, Inggris dan Belgia berpendapat bahwa tantangan utama penerapan Lusaka Ceasefire Agreement sendiri datang dari Kabila selama dia tidak mau mengurangi aktifitas militernya terutama di daerah Eastern Congo yang merupakan basis dari para pemberontak berada. Mereka juga sepakat eksploitasi ilegal terhadap sumberdaya alam DRC selama perang berlangsung merupakan tujuan utama negara-negara tetangga DRC ikut terlibat dalam perang Congo.

Banyak langkah yang harus dilakukan PBB dengan MONUC sebagai instrumtnya untuk membawa DRC ke dalam damai. Negosiasi harus dipromosikan tidak hanya antar pemimpin negara tetapi juga kelompok bersenjata yang terlibat bahkan kelompok civil society pun harus diikutsertakan. Pemerintah negara-negara yang terlibat dalam konflik terutama DRC bisa memberikan lingkungan yang mendukung MONUC untuk menjalankan misinya. Negara-negara pendonor juga mempunyai peran yang signifikan untuk memberikan bantuan dana agar peace process

bisa berjalan secara lancar dengan cara bisa memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk melaksanakan isi dari perjanjian perdamaian atau jika tidak bantuan ekonomi akan dihentikan.

Damai di DRC tercipta ketika hambatan-hambatan yang bersifat struktural yang menjadi penyebab konflik dan kekerasan bisa diatasi dengan baik, jadi tidak hanya menciptakan peace secara negatif saja tetapi juga terciptanya positive peace yang menjamin keberadaan human security terpenuhi. Setelah perdamaian tercipta yang perlu dijaga adalah jangan sampai DRC mengalami kembali perang sipil dengan usaha conflict preventive dengan keterlibatan semua pihak dan dukungan dari dunia internasional agar tidak lagi jatuh dalam perang regional yang menghancurkan.

### Penutup

Dari uraian konsep dan teori diatas maka bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa ketidakmaksimalan MONUC dalam menjalankan mandat “civillian protection” dalam rangka menciptakan peace building di DRC adalah dikarenakan tingkat hostility yang tinggi dimana indikator-indikator seperti sentimen etnis, tingginya korban jiwa dan pengungsi, waktu perang yang lama, banyaknya aktor yang terlibat sehingga menyulitkan untuk dilakukan kesepakatan yang menghasilkan win-win solution membuat tingkat eskalasi konflik semakin besar dengan penduduk sipil sebagai korban. Local capacity DRC dengan tingkat perekonomian yang dibawah garis kemiskinan membuat pemerintah tidak mampu secara aktif untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan bagi rakyat DRC dan di lain pihak sumber-sumber kekayaan (resorces) dikuasai oleh kelompok pemberontak untuk membiayai aktifitas mereka. Kurangnya local capacity DRC mengakibatkan negara tidak mampu melindungi warganya yang dijadikan target serangan pemberontak. MONUC sebagai misi perdamaian PBB untuk DRC ternyata juga tidak mampu secara maksimalk menyelamatkan penduduk sipil dari bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi karena mandat

yang terbatas serta kurangnya koordinasi dengan pemerintah DRC. Meskipun internasional capacity secara besar-besaran dikirim ke DRC namun karena ketidakmampuan pemerintah DRC dalam mengembangkan local capacity serta kompleksnya hostility membuat MONUC tidak bisa secara maksimal melakukan perlindungan terhadap warga sipil. Damai di DRC tercipta ketika hambatan-hambatan yang bersifat struktural yang menjadi penyebab konflik dan kekerasan bisa diatasi dengan baik, jadi tidak hanya menciptakan peace secara negatif saja tetapi juga terciptanya positive peace yang menjamin keberadaan human security terpenuhi. Setelah perdamaian tercipta yang perlu dijaga adalah jangan sampai DRC mengalami kembali perang sipil dengan usaha conflict preventive dengan keterlibatan semua pihak dan dukungan dari dunia internasional agar tidak lagi jatuh dalam perang regional yang menghancurkan.

### Daftar Pustaka

- Al-Qaq, R.K., (2009). *Managing World Order: United Nations Peace Operations and The Security Agenda*. London, UK: Tauris Academic Studies.
- Bernath, C., Edgerton, A. (2003). *MONUC: Flawed Mandates Limit Success*. Washington DC: Refugess International.
- Carayannis, T., Weiss, H. (2003). *The Democratic Republic of Congo, 1996-2002' in Boulden, J. (ed.) Dealing with conflict in Africa: The United Nations and Regional Organizations*. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
- Doyle, M.W., Sambanis, N. (2005). *Making War and Building Peace: The United Nations since 1990's*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- MacQueen, N., (2006). *Peacekeeping and International System*. New York: Routledge.
- Paris, R. (2004). *At War End's: Building Peace After Civil Conflict*. New York: Cambridge University Press.

Samset, I. (2010). *UN Peacekeeping in the Congo: When is the Job Done?*. Norway: Norwegian Peacebuilding Centre.

Swart, S.G., (2008). *The Role of Preventive Diplomacy in African Conflict: A Case Study of the Democratic Republic of Congo 1998-2004*. Pretoria: University of Pretoria.

Swart, S.G. and Solomon, H., (2004). *Conflict in the DRC: A critical assessment of the Lusaka Ceasefire Agreement* in SAIIA Report, No 40. Johannesburg: The South African Institute for International Affairs

International Crisis Group Report. (2006) *Scramble for The Congo: Anatomy of An Ugly War*. Brussels, Belgia: Author.

<http://www.monuc.org>

<http://www.monusco.unmissions.org>